

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PRIASTUTI ANDAYANI

Magister Manajemen Universitas Islam Kediri

ABSTRACT

Government Accounting Standards is the accounting principles applied in preparing and presenting financial statements presented in the Government Regulation No. 71 Year 2010 accrual. This study aims to determine: (1) Preparedness Kediri Regency Government in implementing the Accrual Based Government Accounting Standards. (2) The preparation of financial statements in accordance Kediri Regency Government Accounting Standards Accrual Based Government.

The method used in this study is a qualitative method of secondary data sources: (1) Kediri Regency Government Financial Statements of the fiscal year 2015 consisted of the Budget Realization Report (LRA); Reports Budget Balance Changes Over (Statement of Changes SAL); Balance Sheet; Statements of Operations (LO); Cash Flow Statements (LAK); Statement of Changes in Equity (LPE); Notes to the Financial Statements (CaLK), (2) of Government Regulation No. 71 Year 2010 concerning the Government Accounting Standards. Analysis Techniques used: (1) Data Reduction (data reduction), (2) Data Display (Data Presentation), (3) Conclusion Drawing / verification.

From the results of research can be concluded that the District Government Kediri already fully apply the standard of preparation of financial statements accrual has been set in Government Regulation No. 71 of 2010 concerning the Government Accounting Standards and Conformity between the Financial Statements of the Government of Kediri with Government Regulation No. 71 of 2010 on Accounting Standards Government.

Keywords: Financial Statement, Accrual basic.

ABSTRAK

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang disajikan dalam PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Kesiapan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. (2) Penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data sekunder : (1) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri tahun anggaran 2015 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Arus Kas (LAK); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Teknik Analisis yang digunakan : (1) *Data Reduction* (Reduksi data), (2) *Data Display* (Penyajian Data), (3) *Conclusion Drawing/verification*.

Dari hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri sudah sepenuhnya menerapkan standar penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kesesuaian antara Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Basis Akrual

PENDAHULUAN

Reformasi Keuangan Negara yang ditandai dengan lahirnya paket Undang-undang di bidang Keuangan Negara pada tahun 2003 dan 2004 mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (*good governance*) yang antara lain berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan

akuntabilitas, serta mengikuti *international best practices* yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Reformasi keuangan negara mencakup reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Hal ini ditandai dengan kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan

negara berupa laporan keuangan pemerintah yang setidaknya-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara dan badan lainnya. Saat ini pemerintah telah menyusun Laporan Keuangan dengan Basis Kas Menuju Akruwal yang merupakan basis transisi sampai dengan akuntansi berbasis akrual sebagaimana ditetapkan dengan paket Undang-undang bidang keuangan Negara dapat diterapkan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur bahwa tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual. Pada tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi akrual. Kabupaten Kediri mulai tahun anggaran 2015 menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, maka peneliti bermaksud menganalisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Akuntansi Laporan Keuangan

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan.

Pengguna laporan keuangan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- a. masyarakat;
- b. wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- d. pemerintah.

Peran dan Tujuan Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengamanatkan setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas
- b. Manajemen
- c. Transparansi
- d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
- e. Evaluasi Kinerja

Komponen Laporan Keuangan

Pokok Laporan Keuangan Pemerintah berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ada empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan :

- a. Basis akuntansi
- b. Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost*)
- c. Prinsip Realisasi (*Realization*)
- d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)
- e. Prinsip Periodisitas (*Periodicity*)

- f. Prinsip Konsistensi (*Consistency*)
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)
- h. Prinsip Penyajian Wajar

Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diantaranya sebagai berikut :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Informasi yang disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Operasional
- g. Laporan Perubahan Ekuitas
- h. Catatan atas Laporan Keuangan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena penelitian ini akan mendeskripsikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- 3. Neraca;
- 4. Laporan Operasional (LO);
- 5. Laporan Arus Kas (LAK);
- 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Jenis data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data kualitatif dengan sumber data sekunder yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri tahun anggaran 2015 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

a. Data Reduction (Reduksi data)

Reduksi data dilakukan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan dalam hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan *flowchart*.

c. Conclusion Drawing/verification

Langkah ini dilakukan dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Peneliti menarik kesimpulan yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2015 telah sesuai atau belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun anggaran 2015 yang lalu telah menyajikan laporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrua sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Dengan demikian subyek penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2015.

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2015

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan daerah juga digunakan untuk membandingkan

realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan

membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Komponen laporan keuangan Kabupaten Kediri yang disusun dan disajikan terdiri dari :

Tabel Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

URAIAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)	%	REALISASI 2014 (Rp)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN – LRA	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Pajak Daerah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Lain-lain PAD yang Sah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
PENDAPATAN TRANSFER	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Bagi Hasil Pajak	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Dana Alokasi Umum (DAU)	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Dana Alokasi Khusus (DAK)	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Dana Penyesuaian	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Bantuan Keuangan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Pendapatan Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
BELANJA	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
BELANJA OPERASI	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Pegawai	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Bunga	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Hibah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Bantuan Sosial	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
BELANJA MODAL	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Modal Tanah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx

URAIAN	ANGGARAN 2015 (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)	%	REALISASI 2014 (Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Modal Aset Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
BELANJA TAK TERDUGA	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Tak Terduga	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
TRANSFER	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Transfer Bantuan Keuangan Desa	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
SURPLUS / (DEFISIT)	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
PEMBIAYAAN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Penggunaan SiLPA	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Pencairan Dana Cadangan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Kembali Piutang	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Pembentukan Dana Cadangan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
PEMBIAYAAN NETTO	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx	xxx.xxx.xxx

Tabel menunjukkan bahwa Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Kediri tahun anggaran 2015 menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran meliputi :

- a. Pendapatan – LRA, terdiri dari :
 - 1) Pendapatan asli daerah (PAD) – LRA.
 - 2) Pendapatan transfer.
 - 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Belanja, terdiri dari :
 - 1) Belanja operasi.
 - 2) Belanja modal.

- 3) Belanja tak terduga.
- c. Transfer, terdiri dari :
 - 1) Transfer bagi hasil pendapatan.
 - 2) Transfer bantuan keuangan.
- d. Surplus / (defisit)
- e. Pembiayaan, terdiri dari :
 - 1) Penerimaan pembiayaan.
 - 2) Penerimaan pembiayaan.
- f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Laporan realisasi anggaran Kabupaten Kediri juga menyajikan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebagai pembandingan dengan tahun sekarang.

Tabel Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

URAIAN	reff	TAHUN 2015	TAHUN 2014
1	2	3	4
Saldo Anggaran Lebih Awal		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Sub Total		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Sub Total		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Saldo Anggaran Lebih Akhir		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

Tabel menunjukkan bahwa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2015 menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Tabel Necara

URAIAN	reff	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014 (audited)
1	2	3	4
ASET		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LANCAR		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Kas di Kas Daerah		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Kas di Bendaharan Penerimaan		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Kas di BLUD		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Kas di Bendahara FKTP		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Kas di Bendahara BOS		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Piutang Pajak		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Piutang Retribusi		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Piutang Bagi Hasil		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Piutang Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Penyisihan Piutang		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Belanja Dibayar di Muka		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
INVESTASI JANGKA PANJANG		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Investasi non Permanen		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx

URAIAN	reff	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014 (audited)
1	2	3	4
Investasi dalam Surat Utang Negara		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Investasi dalam Proyek Pembangunan		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Investasi Dana Bergulir		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Penyisihan Investasi Non Permanen – Dana Bergulir		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Investasi Non Permanen Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Penyisihan Investasi Non Permanen – Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Investasi Non Permanen		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Investasi Permanen		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Investasi permanen Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Investasi Permanen		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Tanah		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Jalan, Irigasi dan jaringan		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Akumulasi Penyusutan		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
DANA CADANGAN		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Dana Cadangan		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Dana Cadangan		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Tagihan Penjualan Angsuran		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Tuntutan Perbendaharaan		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Tuntutan Ganti Rugi		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Utang Bunga		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx

URAIAN	reff	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014 (audited)
1	2	3	4
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Bagian lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Bagian lancar Utang Jangka Pendek Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Utang jangka pendek Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Utang Dalam Negeri – Obligasi		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang - Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Jumlah kewajiban jangka panjang		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS DANA		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS DANA LANCAR		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Pendapatan yang Di tangguhkan		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Cadangan Piutang		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Cadangan Persediaan		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS DANA INVESTASI		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Diinvestasikan Dalam Investasi jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS DANA CADANGAN		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH EKUITAS DANA		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		xxx.xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx.xxx

Tabel 1.8 menunjukkan bahwa Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Neraca Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2015 menyajikan pos-pos aset yang terbagi menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya. Kemudian kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Selain

kedua pos tersebut, neraca Pemerintah Kabupaten Kediri juga menyajikan ekuitas dana yang terdiri dari Ekuitas dana lancar, Ekuitas dana investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

Tabel Laporan Operasional (LO)

No. Urut	Uraian	Reff	Tahun 2015	Tahun 2014	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6	7
	KEGIATAN OPERASIONAL					
	PENDAPATAN - LO					
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO					
	Pendapatan Pajak Daerah - LO					
	Pendapatan Retribusi Daerah – LO					
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO					
	Lain-lain PAD yang Sah – LO					
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO					
	PENDAPATAN TRASNFER - LO					
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO					
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO					
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO					
	Bantuan Keuangan – LO					
	Jumlah Pendapatan Transfer - LO					
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO					
	Pendapatan Hibah – LO					
	Dana Darurat – LO					
	Pendapatan Lainnya – LO					
	Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah					
	Jumlah pendapatan					
	BEBAN					
	BEBAN OPERASI					
	Beban Pegawai					
	Beban Barang dan Jasa					
	Beban Bunga					
	Beban Subsidi					
	Beban Hibah					
	Beban Bantuan Sosial					
	Beban Penyusutan dan Amortisasi					
	Beban Penyisihan Piutang					
	Beban Lain-lain					
	Jumlah Beban Operasi					
	KEGIATAN OPERASIONAL					
	BEBAN TRASNFER					
	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah					
	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya					

No. Urut	Uraian	Reff	Tahun 2015	Tahun 2014	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6	7
	Beban transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya					
	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa					
	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya					
	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus					
	Jumlah Beban Transfer					
	Jumlah Beban					
	Jumlah Surplus/Defisit dari Operasi					
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO					
	Surplus Penjualan Aset Non lancar – LO					
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO					
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya – LO					
	Jumlah Surplus Non Operasional					
	DEFISIT NON OPERASIONAL - LO					
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO					
	Defisit Penyelesaian Kewajiban jangka panjang – LO					
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya – LO					
	Jumlah defisit Non Operasional					
	Jumlah surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional					
	POS LUAR BIASA					
	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO					
	Pendapatan Luar Biasa - LO					
	Jumlah Pendapatan Luar Biasa					
	BEBAN LUAR BIASA					
	Beban Luar Biasa					
	Jumlah Beban Luar Biasa					
	Pos Luar Biasa					
	SURPLUS/DEFISIT - LO					

Tabel 1.9 menunjukkan bahwa Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2015 menyajikan pos-pos Pendapatan-LO dari kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO, Beban dari kegiatan operasional berupa Beban Operasi dan Beban Transfer. Juga disajikan pos Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional berupa Surplus Non Operasional-LO dan Defisit Non Operasional-LO, Pos luar biasa berupa Pendapatan Luar Biasa-LO dan Beban Luar Biasa, kemudian juga disajikan Surplus/defisit-LO.

Tabel Laporan Arus Kas (LAK)

Uraian	Reff	Tahun 2015	Tahun 2014 (audited)
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk :			
Pendapatan Pajak Daerah			
Pendapatan Retribusi Daerah			
Dipisahkan			
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
Dana Bagi Hasil Pajak			
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)			
Dana Alokasi Umum			
Dana Alokasi Khusus			
Dana Alokasi Khusus Tambahan			
Dana Otonomi Khusus			
Dana Penyesuaian			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak			
Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			
Pendapatan Hibah			
Pendapatan Dana Darurat			
Pendapatan Lainnya			
Jumlah Arus Kas Masuk			
Arus Kas Keluar :			
Belanja Pegawai			
Belanja Barang dan Jasa			
Bunga			
Subsidi			
Hibah			
Bantuan Sosial			
Belanja Bantuan Keuangan			
Belanja Tidak Terduga			
Bagi hasil Pajak			
Bagi Hasil Retribusi			
Bagi Hasil Pendapatan lainnya			
Jumlah Arus kas Keluar			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi			
Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan			
Arus Masuk Kas :			
Pendapatan Penjualan atas Tanah			
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin			
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan			
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap lainnya			
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya			
Pencairan Dana Cadangan			
Jumlah Arus Kas Masuk			

Uraian	Reff	Tahun 2015	Tahun 2014 (audited)
1	2	3	4
Arus Keluar Kas :			
Belanja Tanah			
Belanja Peralatan dan Mesin			
Belanja Gedung dan Bangunan			
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Belanja Aset Tetap lainnya			
Belanja Aset Lainnya			
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah			
Jumlah Arus Kas Keluar			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi			

Tabel menunjukkan bahwa Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

Tabel Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

URAIAN	reff	TAHUN 2015	TAHUN 2014
1	2	3	4
EKUITAS AWAL			
SURPLUS/DEFISIT-LO			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR :			
Koreksi Nilai Persediaan			
Selisih Revaluasi Aset Tetap			
Koreksi ekuitas lainnya			
EKUITAS AKHIR			

Tabel menunjukkan bahwa Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2015 menyajikan pos-pos Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar yaitu Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap dan Koreksi ekuitas lainnya, serta Ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sistematika Penyajian :

A. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

B. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

C. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target telah Ditetapkan

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 4.3. Basis Pengakuan dan Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Tanggungjawab Pelaporan Keuangan dan Periode Pelaporan
 - 4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- E. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
- 5.1. Neraca
 - 5.2. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.3. Laporan Arus Kas
 - 5.4. Laporan Operasional
 - 5.5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.7. Catatan atas Laporan Keuangan
- F. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
- G. PENUTUP

Pada Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2015 disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2015 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri sudah sepenuhnya siap dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Dalam Penyusunan laporan Keuangan telah terdapat kesesuaian antara Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam Laporan Keuangan

- pemerintah kabupaten Kediri menunjukkan bahwa Penyajian Informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) dalam laporan Keuangan Pemerintah kabupaten Kediri menunjukan menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya sedangkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya
 - c. Neraca dalam Laporan Keuangan pemerintah kabupaten Kediri merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
 - d. Laporan Operasional (LO) dalam Laporan Keuangan pemerintah kabupaten Kediri menyajikan pos-pos Pendapatan-LO dari kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO, Beban dari kegiatan operasional berupa Beban Operasi dan Beban Transfer, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-

- pos terdiri dari Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Beban dari kegiatan operasional, Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada, Pos luar biasa, bila ada, Surplus/defisit-LO.
- e. Laporan Arus Kas (LAK) dalam Laporan Keuangan pemerintah kabupaten Kediri menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dalam Laporan Keuangan pemerintah kabupaten Kediri menyajikan pos-pos Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar yaitu Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap dan Koreksi ekuitas lainnya, serta Ekuitas akhir. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos terdiri dari Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam Laporan Keuangan pemerintah kabupaten Kediri disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
[Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
Cristy Soputan, Jullie J Sondakh, Steven Tangkuman, "Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Pp Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Di Provinsi Sulawesi Utara", Jurnal EMBA 592, Vol.3 No.1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado.
Etrin Damayanti, 2012, "Analisis Implementasi Basis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Berbasis Cash Towards Accrual tahun anggaran 2007 – 2009", Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi Depok, Universitas Indonesia.
Fitria Ayu Lestari Niu, Herman Karamoy, Steven Tangkuman, 2014, Analisis Penerapan PP. No. 71 tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu, Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurnal EMBA, Vol.2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi.

- Friska Langelo, David Paul Elia Saerang, Stanly Winylson Alexander, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung", *Jurnal EMBA 1* Vol.3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat, Jakarta.
- Ihwan Kema, 2013, "Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Manado", *Jurnal EMBA* Vol.1 No.3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Muhamad Indra Yudha Kusuma, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual pada Pemerintah", *Skripsi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013)*
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2012. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Alfabeta. Bandung.
- Wasik Nista Rintiani, 2014, "Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010", *jurnal ekonomi, Manajemen, Universitas Negeri Surabaya*.